

**PEMIKIRAN ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG KONSEP AGAMA DAN
NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Siyasah
(Hukum Tata Negara) dan Hukum

Oleh :

**EPI TAMALA
NPM: 1421020067**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1998.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dikembangkan		
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	zh
ث	ṣ	ع	‘
ج	j	غ	g
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	z	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ه	h
ض	ḍ	ي	y

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

Ta’marbutah

هبة	Ditulis	Hibbah
خزبة	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila dikehendaki dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al-ailiyā’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”z.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ا	kasrah	Ditulis	i
أ	fathah	Ditulis	a
و	dammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ă Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	ă yas'ă
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	î karîm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û furûd

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaulun

ABSTRAK

PEMIKIRAN ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG KONSEP AGAMA DAN NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH

Oleh :

Epi Tamala

Persoalan pertama dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah dalam sejarah adalah masalah politik, yakni masalah kepemimpinan negara, hal ini terjadi dikarenakan Rasulullah tidak memberikan keterangan yang jelas siapa yang menggantikannya sebagai pemimpin, dan apakah kelak Islam harus memiliki (mendirikan) sebuah negara dalam bentuk yang khusus bagi komunitas muslim yang wilayahnya sudah keseluruhan jazirah Arab, yang disatukan dengan prinsip kesatuan ilahi dan asas persamaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang konsep Agama dan Negara menurut fiqh siyasah? Dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang konsep agama dan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang konsep agama dan negara. Serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang konsep agama dan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku yaitu: Buku-buku Ali Abdu al-Raziq, Al-Qur'an dan hadits, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel Internet.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,

1. Ali Abdu al-Raziq berpandangan bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Teori tentang Negara tidak dijelaskan secara ril dan terinci dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah.
2. Ali Abdu al-Raziq berpendapat bahwa Agama dan Negara tidak ada keterikatan. Sedangkan
3. Fiqh siyasah memberikan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai indikator untuk menjalankan roda pemerintahan dalam bernegara secara Islami yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : PEMIKIRAN ALI ABDU AL-RAZIQ
TENTANG KONSEP AGAMA DAN NEGARA
MENURUT FIQH SIYASAH**
Nama : Epi Tamala
NPM : 1421020067
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S. Ag M.H.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan,

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “PEMIKIRAN ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG KONSEP AGAMA DAN NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH” disusun oleh **EPI TAMALA, NMP. 1421020067**, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Rabu, 04 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frengki, M.Si.

Sekretaris : Helma Maraliza. S.E.I.,M.E.I.

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, M. H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhâi) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah di Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedatangan (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya”. (QS. Ali-Imran [3] :19).*



PERSEMBAHAN

Berdasarkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas limpahan karuniaNya, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Ida yang selalu saya banggakan, hormati, dan sangat saya sayangi. Do'a tulus dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, tenaga, pikiran, dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkanku, dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, tanpa ada rasa lelah, selalu mengingatkanku untuk selalu bersyukur dan tidak pernah putus asa dalam meraih semua cita-cita dan harapanku, dalam ketulusan serta keikhlasan do'a mereka hingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung. Semoga Allah memuliakan mereka baik dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan adikku Hendra Edi Saputra, Erna Wati dan Yudi Saputra yang selalu memberi inspirasi, motivasi serta semangat kepadaku. Semoga Allah juga kabulkan mimpi dan cita-cita kalian, semoga kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Kepada Hiqi Alim yang selalu member inspirasi, motivasi serta semangat kepadaku.
4. Kepada sanak saudara, family yang terus mendoakan keberhasilanku, memberikan semangat dan bantuan secara materil maupun formil dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta almamaterku tercinta UIN RadenIntan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Epi Tamala yang lahir di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 05 Desember 1995. Alamat Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nasir dan Ibu Ida.

Adapun pendidikan yang peneliti tempuh adalah: Pendidikan Formal pertama kali pada usia 6 tahun mulai masuk SDN 1 Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kependidikan MTsN Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan kependidikan SMAN 1 Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Pada tahun 2017 peneliti melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Blitarejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dan Praktik Pengadilan Semu (PPS) di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah”**.

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas syariah Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. BapakDrs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing I danAgustinaNurhayati, S. Ag M.H. selaku pembimbing II, yang telah

menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh perkuliahan sampai selesai.
5. Untuk Sahabat-sahabatku Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Feni Sabrina, Lisa Oktavia, Yana Puspita, Farida Khoiriah, Sepriyani dan Semua teman-teman kelas A angkatan 2014 yang selalu member insprasi, motivasi, do'a serta semangat, dan mengajarkanku betapa pentingnya tanpa harus menunda-nunda dan menyia-nyiakan waktu dalam menyelesaikan sesuatu.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti, namun telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas amal dan kebaikan atas semua bantuan bantuan dan partisipasi semua pihak dalam menyelesaikan skripsi. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi diri pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung,

2018

Peneliti,

EPI TAMALA

NPM: 1421020067

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Fiqh Siyasah	12
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	18
C. Prinsip Siyasah Tentang Agama dan Negara	21
1. Menurut Al-Qur'an.....	21
2. Menurut Hadits.....	27
D. Konsep Agama dan Negara Menurut Pendapat Ulama.....	31
E. Menurut Pemikir Kontemporer Relasi Agama dan Negara	36
1. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi	36
2. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Sekuler.....	38
3. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Komunisme	40
4. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam	40
 BAB III BIOGRAFI ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA	
A. Biografi Ali Abdu al-Raziq dan Karya-karyanya	45
1. Biografi Ali Abdu al-Raziq	45
2. Karya-karya Ali Abdu al-Raziq.....	49
B. Kondisi Politik Pada Masa Ali Abdu al-Raziq.....	50
C. Pemikiran Ali Abdual-Raziq Tentang Agama dan Negara.....	54

BAB IV ANALISIS

A. Pemikiran Ali Abdu al-Raziq tentang Konsep Agama dan Negara.	64
B. Pemikiran Ali Abdual-Raziq Tentang Konsep Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu penelitian akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat pada judul ini. Adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang saya maksudkan, sebab judul adalah kerangka dalam berfikir dan bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca suatu karya ilmiah, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul: “Konsep Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama Dan Negara Menurut Fiqh Siyasah”. Judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan dalam kajian yang peneliti buat yakni:

- Konsep adalah rancangan sesuatu yang telah ada didalam pemikiran¹
- Pemikiran sendiri berarti kegiatan akal manusia untuk mencermati suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru.²
- Āli Abdu al-Rāziq adalah salah seorang ulama Al-AzharAsy-Syarif. Ia dilahirkan di provinsi Mania, pada tahun 1888, ayahnya Hasan Abd Al-Roziq adalah seorang pasya besar yang berpengaruh dan mempunyai tanah yang luas.

¹Peter salim, yeni salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Lentera Basritama, 1990), h. 764

²Jamaluddin, *Berfikir Apa dan Bagaimana*, Surabaya Indah, 1989.h.26

Ayahnya aktif dalam kegiatan politik dan menjadi wakil ketua Hizbul al-ummah (Partai Rakyat) pada tahun 1907.³

- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.⁴ Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

- Fiqh Siyasah adalah suatu konsep fiqh yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan nilai-nilai Islami.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, maka dapat diambil suatu pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan “Konsep Pemikiran Āli Abdu al- Rāziq Tentang Agama Dan Negara Menurut Fiqh Siyasah” adalah suatu konsep pemikiran dari tokoh Islam yakni Ali Abdu al-Raziq tentang Agama dan Negara dalam pandangan fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah:

Alasan Objektif:

1. Ingin lebih menguasai tentang Pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang Konsep Agama dan Negara.
2. Untuk mengkaji lebih dalam tentang Pemikiran Āli Abdu al-Rāziq Tentang Konsep Agama dan Negara menurut fiqh siyasah.

³Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Cv. PustakaSetia, 2010)h. 443.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet IV, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, h.956

⁵Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut. h.178.

Alasan subjektif:

1. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang saya pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
2. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Äli Abdu al-Räziq adalah salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Ia menyusun sebuah karya penting berjudul “Al Islām wa ushūl Al-Hukm”(Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan) pada tahun 1925. Menurut pemikiran beliau Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Melalui proyek ajaran reformasi pemikiran agamanya, ia menuntut pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah. Wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya . Abdu al-Raziq berkata “Islam tidak mengurus pemerintahan, atau negara atau kecenderungan-cendrungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tidak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memandang tidak memberikan perhatian padanya. Demikian pula Rasul”⁶

Terbitnyabuku Äli Abdu al-Räziq tersebut mendapat tantangan hebat dari berbagai pihak.

⁶ Ali AbdAr-Raziq, *Al-Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan : Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 123

Hal ini karena pandangannya bertolak belakang dengan consensus yang selama ini disepakati para ulama yang meyakini bahwa *khilafāh* adalah bagian takterpisahkan dari islam. Mereka menilai ide Āli Abdu al-Rāziq tersebut merusak kebenaran yang telah mapan dalam sejarah umat Islam.

Publikasi buku tersebut juga telah memunculkan perdeatan hebat di Mesir yang takpernah usai perdebatan ini dipicu juga karena Āli Abdu al-Rāziq termasuk ulama Al-Azhar pertama yang mendeklarasikan pernyataan “Islam adalah negara bukan agama, Islam adalah sebuah wahyu; bukan pemerintahan”. Tesis utama inilah yang menabrak arus utama keyakinan masyarakat dan ulama saat itu yang mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendiri negara sekaligus agama.⁷

Atas dasar ini, Āli Abdu al-Rāziq adalah orang yang pertamakali menyerukan pemisahan agama dari negara. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individual- spiritual dan tidak memberi perhatian terhadap keduniaan atau politik atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir begitu beliau wafat tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya, baik menyangkut risalah maupun klaim-klaimnya. Āli Abdu al-Rāziq melihat Rasullullah dari dua sisi:

1. Ia adalah utusan yang diberi wahyu dan membawa risalah langit.
2. Ia adalah seorang pemimpin politik untuk negara madinah, bahkan, ia adalah pemimpin politik pertama dalam Islam.

Oleh karena itu, Abdu Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga Khilafah atau amanat besar.ia berkata “Sesungguhnya Khilafah sama sekali tidak

⁷ Abd. Salam Ariel, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, 2007), h. 142-143

memiliki landasan-landasan dari agama. Khilafah bahkan kebalikan agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsipnya”⁸

Fiqh siyasah salah satu ilmu dalam rumpun fiqh telah memberikan beberapa prinsip terkait hubungan dalam agama dan bernegara agar nilai-nilai Islam dapat menuntun ke arah peradaban yang lebih gemilang, dimana prinsip-prinsip tersebut digali melalui Al-Qur'an dan Hadits. Termasuk mengenai beberapa prinsip kajian fiqh siyasah pula membahas tentang pemikiran politik Islam yang diwakili para pemikir muslim dari era klasik hingga kontemporer yang membahas mengenai agama dan negara.

Kata *khilāfah* diturunkan dari kata *khalāfa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. *Khilafah* menurut Ibnu Kaldun adalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia bagi umat dengan merujuk kepadanya, sebagai pengganti pembuat syariat, (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. *Imāmah* adalah kepemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai ganti fungsi Rasulullah SAW. Senada dengan hal ini di kemukakan oleh At-Taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridha yaitu *imāmah* adalah kepemimpinan umat dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi dari Nabi. Demikian pula pendapat Al-Mawardi; “*Imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.

⁸Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, (Bandaung: Cv. Pustaka Setia, 2010), h. 443-444

Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing. Ia juga memberi pandangan, walaupun antara “memelihara agama dan mengatur dunia” merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan Negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Didalam al-Quran memang terdapat banyak penggunaan kata *al-dunyadanal-akhirat* yang dipasangkan dan digambarkan sebagai dua kutub yang dikotomi baik dari segi konseptualnya maupun aktivitasnya. Tapi ditekankan pula, aktivitas urusan agama dan urusan dunia harus dibuat seimbang, tidak boleh timpang. Keduanya saling terkait.⁹

Mengingat pemikiran Āli Abdu al-Rāziq yang memisahkan urusan antara agama dan negara maka saya ingin mengonseptkan pemikiran beliau tersebut menurut fiqh siyasah terkait hal tersebut melalui prinsip-prinsip fiqh siyasah dan pemikiran politik terkait agama dan negara.

Atas dasar hal-hal sebagaimana yang dipaparkan diatas dipandang baik mengangkat judul ini untuk dijadikan skripsi mengenai Pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang Konsep Agama dan Negara?
2. Bagaimana menurut Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang konsep Agama dan Negara?

⁹Suyuti pulungan, *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, h. 44-46

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang Agama dan Negara.
- b. Untuk mengetahui menurut Fiqh Siyasah terhadap konsep pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang agama dan negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang Pemikiran Āli Abdu al-Rāziq tentang Konsep Agama dan Negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi peneliti untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat di uji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensi, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian saya menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode *diskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran seorang tokoh yaitu Ali Abdl Raziq tentang agama dan negara untuk kemudian dianalisis secara logis. Sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq tentang agama dan negara.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap pemikiran-pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Agama dan Negara baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam

¹⁰ Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), h. 38.

pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber data dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari Al-Quran dan Hadits, buku-buku karya Ali Abdul Raziq.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, media “online”, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian¹¹ dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari , mencatat menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Ed) Cet.4. (Jakarta: Rineka Cipta.1998). h 236

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu member catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (Buku, Literatur atau Dokumen) pemegang hak cipta (Nama penulis, tahun penerbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹²

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan / tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

¹²Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*. (Bandung: TP. Citra AdityaBakti, 2004), h. 23.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang artinya “menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis logis, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.”¹³

Setelah data terkumpul secukupnya, maka peneliti membahas dengan menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Metode deduktif, dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada pengertian khusus atau detail. Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikan dan disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh tentang konsep pemikiran Āli Abdu al-Rāziq mengenai agama dan negara menurut fiqh siyasah.

¹³*Ibid.*, h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan takrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha -yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam yang akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau (tindakan tertentu).

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁴

Sementara siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat. Pertama sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana tertentu. Yang ke dua sebagaimana dianut Ibn Taghri Bidri, siyasah berarti larangan dan dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan.

Dari dua pengertian yang dipaparkan diatas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan fiqh siyasah yaitu pemahaman mengenai aturan hukum-hukum syara dalam pengelolaan suatu politik atau Negara.

¹⁴ Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (2008 : Penerbit Erlangga).h.2

1. Pengertian secara Harfiah

Al siyasah berasal dari kata-kata

ساس يسوسيا سة = دبريد بر تدبيرا

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.

سلس القوم = دبر هم وتولماهم

“Mengatur kaum, memerintah; dan mengurusnya”

Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Qur'an yang menyatakan :

ضَعِيفًا فِينَا لَنَزَلْنَا قَوْلُ مِمَّا كَثِيرًا نَفَقَهُ مَا يَشْعِبُ قَالُوا

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak memahami tentang apa yang kamu katakan...¹⁵”

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata al-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.

Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan:

عن أبي هريرة عن النبي قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

“Dari Abu Huraira, telah bersabda Nabi SAW, Bani Israel dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka,”¹⁶

Secara tersirat dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “Tujuan” yang hendak dicapai melalui proses

¹⁵ Q.S Hud : 91

¹⁶ HR, Muslim.

pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-siyasah pun diartikan: ¹⁷

والسياسة القيام على شيء بما يصلحهم.

“memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”

2. Pengertian Secara Istilah

Pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang sesungguhnya. Tujuan apa yang dicapai dengan mengendalikan menurut fiqh siyasah? dalam keadaan demikian, pengertian teknis akademis, mengenai siyasah dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fatih Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah:

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara”

Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan:

السياسة ما كان فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يكن يشرعه الرسول ولا نزل به وحى

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membuat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT, tidak menentukannya”

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 dan 59 surat an-Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah:

¹⁷ H.A Djazuli, *FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 25-26

قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاية الأمور عليهما أن يؤدوا إلى ما نالت إلى أهلها وإزاحموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت لثالثا نية في الرعيه من الجيوش غيرهم

“Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa : 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil,; sedangkan ayat kedua (an-Nisa : 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer”

Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fatih Bahantsi, member batasan:

“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sultan dan Araja) bukan dari ulama: sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”

Aspek fiqh dari siyasah syar’iyyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab al-Khalaf:

“Siyasah syar’iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudoratan dengan tidak melampaui

batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid”¹⁸

Sebagaimana telah disinggung diatas, batasan-batasan mengenai siyasah syar’iyyah mengisyaratkan dua unsure yang berhubungan secara timbale balik, yaitu: (1) pihak yang mengatur (2) pihak yang diatur. Dilihat dari unsure-unsur yang terlihat dalam proses siyasah syar’iyyah, maka ilmu ini “mirip” dengan ilmu politik. Seperti dikatakan Wirjono Prodjodikoro:

Dua unsure penting dalam bidang politik,yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsure masyarakat”

Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsi, siyasah syar’iyyah berbeda dengan politik. Sebagaimana disebutkan ahli Syariat, siyasah syar’iyyah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “khidmah” tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan “istilah”. Sebaliknya politik (politique) dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah) bukan pengarahan (istilah).

Perbedaan demikian tampak manakala disadari bahwa pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan perspektif fiqh islam terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syara’, sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulliy.

¹⁸Ibid, h. 28.

Oleh karena itu dikalangan kaum muslimin, politik yang bertumpu pada adat istiadat, atau pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi semata dikenal dengan istilah siyasah wadl'iyyah.

Perbedaan diantara siyasah syar'iyyah dipihak yang satu dengan siyasah wadl'iyyah dipihak yang lain, tentu saja , tidak harus dipahami secara dikotomis,. Dalam banyak kasus, siyasah wadl'iyyah yang tidak bertentangan, sekalipun tidak sama, dengan siyasah syar'iyyah diterima keberadaannya oleh kaum muslimin. Singkatnya, tidak semua siyasah wadl'iyyah atau politique bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Sebagaimana tersimak dalam pernyataan Ibn al-Qayyim, siyasah syar'iyyah adalah siyasah mengacu pada syara'. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan,. Hal ini merupakan akibat langsung dari cirri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri yaitu:

Seluruhnya adil, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah, setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kezaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah.

Hal yang sama berlaku pula pada bidang siyasah. Tanpa prinsip-prinsip itu, ihwal pengendalian dan pengarahan pengendalian umat tidak dapat disebut sebagai siyasah syar'iyah.¹⁹

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang .namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁰

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah , lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter, siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah idariyyah (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi Negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyah lebih

¹⁹Ibid, h. 29.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h.14

mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.

Perbedaan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (Politik Hukum)
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. Siyasah idariyyah Syar'iyyah (Politik Administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Politik Hubungan Internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan)²¹

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (ISiyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri;iyyah). Oleh lembaga legislative, peradilan (Qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah

²¹*Ibid*, h. 15.

Kharijiyyah).Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-Siyasah al-Duali al-khashsh) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negri Muslim dan negara non-Muslim (al-Siyasah al-Duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan oleh warga Negara muslim dan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (Siyasah Harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diijinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, lawan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah) antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.²²

²²*Ibid*, h. 16.

C. Prinsip Siyasah Tentang Agama dan Negara

Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung prinsip siyasah tentang agama dan negara, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Al-Qur'an

a. Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu

.....وَحَدَّةُ أُمَّةٍ النَّاسُ كَانَ

Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu.. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 213)

Adapun ayat lain yang menjelaskan prinsip manusia sebagai umat yang satu adalah sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu....(Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

b. Prinsip Berkuasa

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa

dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.. (Q.S. An-Nur [24] : 5)

c. Prinsip Kepemimpinan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat...(Q.S. An-Nisa [4] : 58)

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...(Q.S. An-Nisa [4] : 59)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Allah dan Rasul yang mana beliau adalah pemimpin Umat Muslim, adapun ayat lain yang menjelaskan hal yang sama adalah sebagai berikut :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَاسِرِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri, di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya , niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu.....”(Q.S. AQ. An-Nisa [4] : 83)

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Quran tentang orang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam Islam yang

posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat. Adapun salah satu ayat dalam al-Quran sebagai berikut:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka...(Q.S. Asy-Syu'ara [26] : 38)

e. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat....(Q.S. Al-Hujurat [49] : 10)

f. Prinsip Persamaan

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا^٥ قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ^٦ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

g. Prinsip Hubungan Antar Negara

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

بِالْجُنُبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,”(Q.S. An-Nisa [4] :36)

h. Prinsip Tolong Menolong

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا

الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ج

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah [5] : 2)

Ayat lain yang menyinggung tentang prinsip tolong-menolong adalah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artina: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. At-Taubah [9] :71)

i. Prinsip Membela Negara

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. At-Taubah [9] :39)

j. Prinsip Hak-hak Asasi

1. Hak untuk Hidup

حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan..”(Q.S. Al-Isra [17] : 33)

2. Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi

وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ يَكُونُوا أَنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يُسَخَّرُونَ لَأَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَتَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ يَكُونُوا أَنْ عَسَىٰ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
هُمُ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ إِلَّا سُمْ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim..”(Q.S. Al-Hujurat [49] : 11)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk tidak mencela dan merendahkan orang lain karna boleh jadi orang lain itu lebih baik dari yang mencea, dan ayat lain yang menjelaskan hal yang sama adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang..”(Q.S. Al-Hujurat [49] : 11)

3. Hak Berpendapat dan Berserikat

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿٥٩﴾ 4.

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa [4] : 59)

5. Hak Kebebasan Beragama, Toleransi atas Agama dan Hubungan antar Pemeluk Agama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. ...”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 256)

Adapun ayat lain adalah:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”(Q.S. Al-An’am [6] : 108)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”(Q.S. Mumtahanah [60] : 8)

k. Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksanaan Suatu Urusan

إِنْ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk dipekerjakan (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Dapat disertai amanat)".(Q.S. Al-Qashash [8] : 26)

2. Menurut Hadits

a. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

كلکم راع وكلکم مسؤل عن راعیته والامیر راع والرجل راع علی اهل بیته
والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولده وكلکم راع وكلکم مسؤل عن راعیته

Artinya :tiap-tiap kaum adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka (Muttafak alaih).²³

b. Prinsip kebebasan berpendapat

ان تعبدوه ولا تثرکوا به شیا وان تعصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ان
الله یرضی لکم شلاشا

Artinya : Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kamu tiga hal bahwa hendaklah kamu menyembah-Nya dan jangan menyekutukannya, bahwa kamu berpegang kepada tali Allah dan jangan kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasehat (Kritik) terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu.²⁴

c. Prinsip Dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksanaan Suatu Urusan

اذا ضیعت الامانة فانت فا انتظر الساعة قال : کیف اضاعتها یا ر
سول الله؟ قال : اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعة

Artinya : Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuran, Ditanya: “Bagaimana yang dimaksud menghilangkannya?” Beliau menjawab, “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.”

²³ Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Al-Maktab Al-Islami, Jilid II, t.t, h. 5 dan 54

²⁴H.R. Muslim

d. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin

خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونكم , وتصلون عليكم, وشرار امتكم
الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya : Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (Rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamuyang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.(H.R.Ahmad).²⁵

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas tampak bahwa Al-Qur'an dan Sunah Rasul tidak menentukan system dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bernegara yang harus di ikuti umat Islam, melainkan dasar-dasarnya saja. Tapi dari dasar dan prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan system social pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta tehnik pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.²⁶

D. Konsep Agama dan Negara Menurut Ulama

Wacana seputar konsep Negara Islam telah melahirkan kontroversi dan polarisasi intekektual di kalangan pemikir politik Islam. Apakah benar misalnya Rasulullah pernah mendirikan atau menganjurkan Negara Islam (Islamic state), bukan Negara suku , (clannish state) seperti yang di kemukakan Ali Abdu ar-Raziq. Apakah institusionalisasi Islam dalam bentuk

²⁵Ahmad Bin Hambal, Musnad, Jilid VI, h.24.

²⁶Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014. h. 22.

Negara merupakan kewajiban syari'at ataupun semata-mata kebutuhan rasional seperti yang diteorikan Ibnu Khaldun.

Secara garis besar terdapat dua kekuatan dalam memandang Islam dan Negara. Pertama kaum substantialis, yang memiliki pokok-pokok pandangan sebagai berikut :

1. Bahwa substansi atau kandungan iman dan amal lebih penting dari pada bentuknya.
2. Pesan-pesan Al-Quran dan hadis, yang bersifat abadi dalam esensinya dan universal dalam maknanya, harus ditafsirkan kembali oleh masing-masing generasi kaum muslim sesuai dengan kondisi sosial pada masa mereka.
3. Mereka menerima struktur penerimaan yang ada sekarang sebagai bentuk Negara yang final.

Negara dan agama menurut pandangan Ibn Taimiyah (Tokoh Sunni Salafi), ialah saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.²⁷

Selanjutnya menurut al-Ghazali dalam bukunya "Aliqtishad fi Ali'tiqat" mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar, agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaan, negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia.

²⁷Jhon I. Esporsito, *Islam and Politics*, Terj. H.M Josoeff Sou'yb, "Islam dan Politik", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 38.

Ajaran normative bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari Negara di dukung pula oleh pengalaman umat Islam di Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Terhadap paradigm ini, penjelasan lebih tegas dikemukakan Bahtiar Effendy yang mengemukakan bahwa pada ujung satu spectrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar Negara dan Syari'ah harus diterima sebagai konstitusi Negara, kemudian mengenai kedaulatan politik ada ditangan Tuhan oleh karena itu gagasan tentang Negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan. Beberapa tokoh pemikir lain seperti Rasyid Ridha, sebagai seorang yang kecendrungan tradisional begitu percaya dengan lembaga kesultanan usmani yang menurutnya adalah juga kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari keturunan Quraisy dan Arab.

Rasyid Ridha tampaknya menutup mata terhadap despotisme kesultanan Usmani. Kekhalifahan Utsmani baginya merupakan pranata politik supra nasional yang mewakili nabi pasca Abbasiyah yang mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia yang perlu dihidupkan dengan tugas untuk mengatur urusan dunia dan agama, suatu pemikiran yang sama persis dengan pemikiran Al-Mawardi. Alasannya karena Al-Qur'an, hadis, dan ijma'pun menghendakinya.

Tentu saja ahlul al-hall wa al-'aqd, sebagai lembaga pemilih khalifah juga perlu dibentuk. Hanya saja lebih maju dibanding pemikir politik Islam klasik yang realis pada masa klasik dan pertengahan,

walaupun untuk khalifah menurutnya mesti seorang ahli fiqh yang karena nya untuk mempersiapkannya perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan, tetapi untuk ahlul al-hall wa al-aqd anggotanya bukan saja ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid melainkan juga pemuka masyarakat dari berbagai bidang.

Berbeda dengan pemikir politik sebelumnya, lembaga representative itu dalam pandangannya juga bertugas mengangkat khalifah, mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyelewengan khalifah, dan menurunkannya jika dibutuhkan, sekalipun dengan perang atau kekerasan, demi kepentingan umum. Meskipun pandangan-pandangan Rasyid Ridha sulit diterima untuk konteks kekinian, dimana Rosenthal menganggapnya berada dalam posisi utopis dan romantis.²⁸ bagaimanapun Rasid Ridha telah berhasil mempromosikan tradisi dan merancang gagasan dasar bagi para penganjur Negara Islam.²⁹

Selanjutnya beliau mengakui prinsip syura (Musyawarah) dan aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, system politik modern dimana banyak Negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran

²⁸Gamal Al-Banna, Relasi Agama dan Negara. (Cet.1. Mata Air Publising: Jakarta,2006), h.32

²⁹ Ibid, h.37

Islam.³⁰ Diantara mereka yang masuk ke dalam kategori pendukung alur pemikiran semacam ini adalah Syekh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, dan pemikiran Pakistan Abu A'la Al-Maududi dan Ali Al-Nadvy.³¹

Demikian dalam perspektif teokrasi bemberlakuan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif Negara adalah hal yang niscaya sebagaimana dinyatakan Imam Khomeini yang dikutip Marzuki dan Rumaedi, bahwa dalam Negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorangpun yang berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.³² Pernyataan Khomeini ini diperkuat dengan pernyataan Abu A'la Al-Maududi, salah satu pendukung paradigma ini, bahwa kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang pun bahkan Nabipun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau kemauan sendiri. Nabi sendiri juga terikat oleh perintah-perintah Allah.

Islam, menurut pandangan mayoritas ulama Muslim bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan. Sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, pemerintahan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang ada, terutama pembentukan negara dengan rakyat dan wilayahnya. Dengan kata lain, Islam itu meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem politik,

³⁰ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Pramadina, Jakarta, 1998, h. 12.

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993, h. 1.

³² Din Syamsudin, *op. cit.* h. 58

ekonomi, etika dan kemasyarakatan. Kalau ia hanya tata agama, ia tidak akan membentuk masyarakat dan negara seperti yang ada di Madinah.

Fakta tersebut tidak saja menjadi keyakinan sebagian besar ulama Islam, tetapi juga diakui oleh banyak orang Barat dan kaum orientalis, sebagaimana diutarakan oleh Dhia' al-Din Rais, yang diantara mereka adalah:

1. Dr. Firt Grald berpendapat, bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan juga sebuah tatanan politik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Dr. C. A. Nollino berpendapat, bahwa pada saat yang sama Muhammad sekaligus memberikan agama dan negara, sedangkan peraturan-peraturan negaranya selalu tepat sepanjang hidupnya.
3. Dr. Schatt berkata, islam lebih sekedar agama, ia juga menjabarkan hukum dan politik.
4. Dr. Thomas Arnold berkata, Nabi SAW., seorang kepala agama dan kepala negara,

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa integritas masyarakat islam (umat) yang didirikan dan dibina oleh Nabi SAW., menampakkan keterikatan antara negara dan agama. Argumen ini, dikuatkan lagi oleh penuturan Nurcholish Madjid sebagai dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa salah satu karakteristik agama islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan dibidang politik. Kenyataan itu menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli dan awam., baik muslim maupun non muslim, seperti telah diuraikan dahulu, bahwa islam adalah agama yang terkait erat dengan persoalan kenegaraan. Bahkan disinyalir sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia muncul

ungkapan bahwa “islam adalah agama dan negara” (al-Islam Din wa dawlah) yang mengindikasikan pertautan antara agama dan negara.³³

E. Menurut Pemikir Kontemporer Relasi Agama dan Negara

Hubungan negara dan agama ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD pasal 33, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan maratabat kemanusiaan (ayat 2); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (ayat 3). Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sebagainya.

Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, warga negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme kontrol tidak langsung melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara

³³ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Tranmisi Media, cetakan 1, 2012) h. 109-111

langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara melakukan kontrol secara langsung bisa dilakukan melalui, misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, atau demonstrasi yang santun dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional.³⁴

Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi Negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hubungan antara Agama dan Negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakekatnya Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.

³⁴Ibid, h. 93

Berdasarkan uraian diatas konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing masing keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia berikut di uraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi.

Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.

Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula.sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan dengan

demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama dan agama dengan negara tidak dapat dipisahkan.³⁵

2. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan tuhan dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama.³⁶

3. Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Komunisme

Paham komunisme ini memandang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis paham ini menimbulkan paham Atheis (tak bertuhan) yang dipelopori Karl Marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia dan agama adalah keluhan mahluk tertindas. Oleh karena itu

³⁵ Din Syamsuddin, *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Logos, Jakarta, 2002, h.58.

³⁶ Muhammad Albahy, *Islam dan Sekularisme antara Cita dan Fakta*, Alih Bahasa: Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1988, hlm.10.

agama harus ditekan dan dilarang nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

4. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam

Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa islam tidak ada hubungannya dengan negara karena islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa islam tidak mencakup segala-galanya tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.

Hubungan islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) pandangan: Integralistik, Simbiotik, dan Sekularistik.

A. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa islam tidak mengenal pemisahan antara agama (din) dan politik atau negara (dawlah).

Dalam pergulatan islam dan negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan paham islam ad-Din wa dawlah (islam sebagai agama dan negara), yang sumber hukum positifnya adalah hukum islam (syariat islam). Paradigma integralistik ini antara lain dianut oleh negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut paham Syi'ah di Iran. Kelompok pecinta Ali ra. Ini menggunakan istilah Imamah sebagaimana dimaksud dengan istilah dawlah yang banyak di rujuk kalangan Sunni.

B. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualita). Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu pula sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.

Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama di atas. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan

dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (social contract), tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama (syariat). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada kelompok paradigma ini.³⁷

C. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara.

Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (syariat). Konsep sekularistik dapat ditelusuri pada pandangan Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW. pun tidak

³⁷ M. Sidi Ritaudin, 2012. *Etika Politik Islam*, Jakarta: Tranmisi Media, cetakan 1, h. 30-35

ditemukan keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara islam. Negara Turki dapat digolongkan ke dalam paradigma ini.³⁸

Ketiga paradigma di atas, meskipun tidak persis sama, tapi hampir mirip dengan pendekatan trikotomi yang ditawarkan oleh Bahtiar Effendy dalam menafsirkan islam politik di Indonesia sebagai tinjauan teoritisnya, yaitu pendekatan kelompok fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Kelompok fundamentalis menentang pemikiran sekuler, pengaruh Barat dan Sinkritisme kepercayaan tradisional dan menekankan keutamaan agama atas politik. Kelompok reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tapi mau bekerja sama dengan kelompok-kelompok sekuler atas landasan yang sama-sama disepakati. Kelompok pertama menempati paradigma integralistik dan kelompok kedua mengakses paradigma simbiotik. Sedangkan kelompok akomodasionis tentu tidak bisa serta merta disamakan dengan sekuler, karena sifat dasar dari akomodatifnya kelompok ini demi persatuan dan kesatuan umat serta berpegang pada kepentingan islam secara keseluruhan.

Terlepas dari pendekatan mengenai paradigma di atas, yang jelas yang sudah mengkristal di kalangan muslim bahwa konsep umat sangat menekankan agar menjaga kesatuan organis dan kohesi psikologis tatanan sosial universal tidak partularistik. Al-Qur'an dengan lantang menegaskan bahwa semua berasal dari Yang Satu, dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar bersaudara dan saling tolong-menolong satu sama lainnya.

³⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatulla: Jakarta, Edisi ke-3, 2008) h. 96-97

Universalitas ini tidak dapat dibatasi kasta, kelas atau warna kulit bahkan wilayah dalam arti pelaksanaan syariat islam. Dengan demikian, pemaknaan umat lebih bersifat pluralistik.



BAB III

BIOGRAFI ALI ABDU AL-RAZIQ TENTANG AGAMA DAN NEGARA

A. Biografi Āli Abdul Al-rāziq dan karya-karyanya

1. Biografi Āli Abdul Al-rāziq

Āli Abdul al-rāziq lahir pada tahun 1888 M dan wafat tahun 1966 M., di Menya, Mesir. Ia lahir ditengah-tengah keluarga feodal Mesir yang aktif dalam kegiatan politik pada *hizb al-Ummāh* yang mempunyai intim dengan penjajah Inggris. Partai ini adalah saingan dari Hizb al-watan.

Ayahnya Hasan Abd.Ar-Raziq adalah seorang pasha besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki banyak tanah. Hasan merupakan aktivis politik yang cukup penting saat itu. Ia bahkan pernah menjabat wakil ketua *Hizb al-Ummāh* pada tahun 1907. Setelah revolusi 1919, dibentuk partai politik baru yang bernama *Hisb al-Abrar al-Dusturiyah*, partai ini adalah kelanjutan dari partai *Hizb al-Ummāh* yang punya hubungan erat dengan Inggris.

Āli abdul al-Rāziq merupakan putra dari seorang sahabat Muhammad Abduh. Dia seperti saudaranya, adalah seorang penganut dan murid dari Abduh, meskipun mungkin tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya. Ini mengingat ketika Abduh wafat tahun 1905. Ar-Raziq baru berusia kira-kira tujuh belas tahun, berbeda dengan saudaranya, yakni Mustafa Abd al-Raziq yang pernah di Paris dan menjabat Rektor Al-Azhar pada tahun

1945-1947, Āli Abdul al-Rāziq justru menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketidakpastian.³⁹

Dalam usia muda sekitar 10 tahun, Āli Abdul al-Rāziq memulai belajar di Al-Azhar. Ia belajar kepada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat Abduh. Ahmad Abu Khalwat, seperti juga Abduh adalah murid Jamal ad-Din al-Afgani.

Sejak 1910 ketika ia berusia 22 tahun, Āli Abdul ar-Raziq mengikuti kuliah di Al-Jami'ah Al-Mishriyyah atau Universitas Mesir (sekarang Universitas Cairo) selama hampir 2 tahun. Kuliah-kuliah terpenting yang diikutinya, antara lain, studi sejarah sastra arab dan sejarah filsafat, masing-masing diberikan oleh Nallino dan Santillana. pada usia 23 tahun, Ali Abdul ar-Raziq berhasil menyelesaikan program studinya di Universitas Al-Azhar.⁴⁰

Setelah memperoleh ijazah *Alimiyyah* dari Al-Azhar tahun 1911 Ali Abdul al-Raziq mulai memberikan kuliah di universitas tersebut tahun 1912. Pada pertengahan tahun ini ia berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik dan ekonomi di Universitas Oxford. Disana ia banyak membaca dan mempelajari ide-ide barat. Sebelum genap 2 tahun studi disana, ia terpaksa harus pulang ke Mesir, karena terjailah perang dunia ke I.

Pada tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan diangkat sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyyah. Dalam kedudukannya sebagai hakim itulah, ia mengadakan penelitian yang hasilnya ia bukukan dalam sebuah karya tulis

³⁹Akhmad Satori, *Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Ress, 2007), h. 138- 140.

⁴⁰*Ibid.* h. 140.

berjudul *Al-Islām Wa Ushūl al-Hukm; babs fi al-Khilāfah wa al-Hukmah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan pada April 1925. Karena prestasi yang berhasil ditunjukkannya, disamping memegang jabatan penting, ia juga sempat diangkat menjadi menteri Wakaf.

Ali Abdul al-Raziq adalah sarjana muslim yang pertama kali dicatat sejarahnya sebagai orang yang melancarkan propaganda dengan pena-nya menentang adanya *Khilafah* dan menganjurkan agar umat Islam mengambil sekularisme dan nasionalisme dalam kehidupannya.

Peristiwa paling penting dalam kehidupannya Āli Abdul ar-Rāziq menjadikan namanya termasyhur adalah penerbitan bukunya, *Al-Islām Wa Ushūl al-Hukm*. Begitu terbit dan dibaca para ulama dan pembaca lainnya, serta merta ia mendapat tanggapan dan bantahan keras. Buku itu terkait erat dengan persoalan yang krusial saat itu, masalah Kekhalifahan (*Khilafah*).⁴¹

Sekitar masa diterbitkannya buku Āli Abdul ar-Rāziq tersebut di Kairo pada tahun 1925, Ziya Gokalp dan Mustafa Kemal Attaturk di Turki serta Lutfi as-Sayyid dan Sa'ad Zaglul di Mesir telah melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghapus bekas pengaruh Islam dari pemerintahan negaranya, masing-masing, paling tidak tokoh-tokoh secular ini memiliki keberanian terang-terangan memisahkan diri dari cita-cita Islam. Ali Abdul ar-Raziq juga mencuatkan polemic dengan asumsi, bukan saja umat Islam harus mengambil

⁴¹Ibid, h. 140-141

system-sistem politik Eropa, tetapi Islam itu sendiri tidak ada hubungannya dengan Negara.

Terbitnya buku Ali Abdul ar-Raziq tersebut mendapat tantangan hebat dari berbagai pihak. Hal ini karena pandangannya bertolak belakang dengan consensus yang selama ini disepakati para ulama yang meyakini bahwa *khilafah* adalah sebagian yang takterpisahkan dari Islam. Mereka menilai ide Ali Abdul ar-Raziq tersebut merusak kebenaran yang telah mapan dalam sejarah umat Islam.

Publikasi buku tersebut juga telah memunculkan perdebatan hebat di Mesir yang tak pernah usai. Perdebatan itu juga dipicu karena Ali Abdul ar-Raziq termasuk ulama Al-Azhar pertama yang mendeklarasikan pernyataannya “Islam adalah agama; bukan Negara, Islam adalah, sebuah wahyu; bukan pemerintahan”. Tesis utama inilah yang menabrak arus utama keyakinan masyarakat dan ulama saat itu yang mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendiri Negara sekaligus agama.

Buku ini banyak mendapat kritik dari ulama Al-Azhar, karena kritiknya terhadap system pemerintahan yang dilaksanakan “sekelompok umat Islam” selama sekitar 13 abad, dan terdapat teori-teori politik para ulama zaman klasik dan pertengahan. Konklusi-konklusi yang dikemukakannya merupakan hasil penelitian dan analisisnya terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan kepemimpinan Nabi, teori-teori politik para ulama dan praktik pemerintahan sistim *khilafah*. Buku tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 1925. Akibat bukunya tersebut Ali Abdul ar-Raziq dikutuk dan dikucilkan

majelis ulama Al-Azhar, serta diberhentikan dari jabatan dan keanggotaannya sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan.

Karena diberhentikan dan dilarang berkiprah di jabatan public, dia mencurahkan waktunya di akademi bahasa Arab (*The Academy of Arabic Language*) yang ada di Kairo.

Lalu rapatlah majelis ulama besar Al-Azhar akhirnya memutuskan, buku *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya, ia tidak lagi diakui sebagai ulama, dan namanya dihapus dari daftar ulama Al-Azhar. Ia wafat pada 22 September 1966, ketika berusia 78 tahun.⁴²

2. Karya-karya Ali Abdul ar-Raziq

Sepanjang hayatnya Ali Abdul ar-Raziq hanya menulis satu buku yang tidak begitu tebal dan diterbitkan pada tahun 1344 H/1925.

a. *Al Islam Wa Ushul al-Hukm; Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian tentang *Khilafah* dan Pemerintahan dalam Islam). “Tidak ada Negara islam” itulah inti dari pendapat kontroversial Ali Abdul ar-Raziq yang tertuang dalam buku tersebut.⁴³

b. *Al-Ijma fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Ijma' dalam Syariat Islam) pada tahun 1947. Isinya adalah kumpulan ceramah yang disampaikan dihadapan mahasiswa program diploma Syariah Universitas Kairo. Dalam buku tersebut Syekh Ali berusaha menerangkan hakikat Ijma'

⁴²*Ibid. h. 142-145*

⁴³*Ibid, h..145*

kemungkinan terjadinya Ijma' legalitasnya, hukumnya dan posisi Ijma' diantara dasar-dasar hukum lain.

c. *Min Atsar Mushthofa Abdirraziq* (Warisan-warisan Mushthofa 'Abdurraziq) pada tahun 1957. Di dalamnya, Syekh Ali menceritakan perjalanan kehidupan saudarannya dengan analisis yang tajam dan juga kritikan.

Artikel dan makalah yang belum dikumpulkan menjadi satu. Diantaranya adalah artikel dan makalah mengenai perjalanannya ke Afrika Selatan. Selain itu ada juga kumpulan ceramah di *Ma'had al-Dirasat al-Arabiyyah al-Ulya* (Institusi Studi Arab Program Pasca Sarjana) yang membahas mengenai kehidupan Muhammad Abduh.⁴⁴

B. Situasi Pemikiran Politik Pada Masa Ali Abdu al-Raziq

Landasan semua pemikiran umat muslim tentang agama, sudah barang tentu adalah Al-Qur'an Berbeda dengan Beibel, Al-Quran bukan kumpulan dari beberapa kitab dari zaman yang berbeda-beda dan dari banyak penulis yang tidak sejaman. Ia merupakan kitab kitbah yang disampaikan (secara lisan) oleh Muhammad dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun terakhir masa hayatnya, terutama yang terdiri dari ayat-ayat pendek mengenai ajaran agama maupun akhlak, bantahan-bantahan terhadap orang yang mengingkarinya, sebagai komentar kejadian-kejadian baru, dan beberapa aturan tentang masalah-masalah social dan hukum.

⁴⁴ Kalim Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam, Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abd Raziq*, (Mesir: Erlangga, 2009), h. 26

Penting bagi kita untuk memahami betapa lebarnya kesenjangan antara pendidikan agama dan pendidikan secular di Mesir, ini berikut konsekuensinya yang sangat jauh jangkauannya. Hal ini tidak hanya menempatkan suatu sekolah dalam posisi berlawanan dengan sekolah lainnya dan juga suatu universitas dan universitas lainnya. tetapi lebih juga dari paktor manapun. mendorong timbulnya perpecahan di kalangan umat muslim , yang terutama tampak di kota-kota besar yang menempatkan kelompok ortodok dengan posisi berlawanan dengan kelompok yang “diibaratkan” dalam hamper kegiatan social maupun intelektual, dalam cara berpakaian, sikap hidup, kebiasaan-kebiasaan, dalam masyarakat, hiburan, sastra, bahkan dalam percakapan mereka.⁴⁵

Kenyataan tentang adanya kesenjangan dan perlunya diakhiri kesenjangan inilah yang mendorong timbulnya modernism (Islam) itu. Pada saat yang sama, ia menampilkan pengertian-pengertian dilemmakemana gerakan pembaharuan itu dipaksa masuk tanpa apapun. Disatu pihak, dalam upaya menuju pormulasi prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang modern, para pembaharu itu sebagaimana semua pembaharu lain sebelum mereka, pada semua kelompok masyarakat, yang secular maupun yang beragama, hanya menjangkau sebagian besar kalangan terpelajar, tidak menyentuh rakyatkebanyakan. Karena itu pengaruh mereka jauh lebih besar

⁴⁵ Gibb H.A.R., *Aliran-aliran Moden Dalam Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), 1996. h, 73.

dikalangan umat muslim terpelajar di luar kelompok ahli-ahli agama (Ulama).⁴⁶

Tetapi pada abad ke-19, pandangan dari kalangan terpelajar mengenai hal-hal ini semua mengalami perubahan secara cepat. Sebagai pengganti teologi rasional pertahanan agama yang baru dipercayakan kepada kesadaran bertuhan yang terdapat dalam jiwa manusia. dan kecenderungan untuk menekankan Tuhan ini, bukan Tuhan transenden, diperkuat dengan berlakunya konsep perkembangan atau evolusi. secara tepat dapat dikatakan bahwa, dalam kenyataan ini salah satu perbedaan tajam antara Barat yang Kristen dan dunia Islam. Sementara di Barat banyak ahli teologi yang mencoba membentuk kembali pemikiran agama sesuai dengan ide-ide filsafat dan sejarah yang berlaku, di kalangan para ulama Muslim justru tidak ada kegiatan semacam itu kecuali dengan batas yang sangat kecil kita melihatnya dalam kegiatan Syekh Muhammad Abduh. Sikap sebagian besar ulama ortodoks itu mirip dengan sikap pemimpin Gereja Katolik Romawi terhadap masalah serupa dalam peradaban kita. Ia menolak tegas untuk menyetujui segala macam bentuk dukungan terhadap filsafat dan sains-sains baru itu.

Dengan pengetahuan selintas mengenai situasi politik (Khususnya keadaan kekhalifahan) di Timur Tengah ketika itu, pada tahun 1947, catatan politik Ali Abdu ar-Raziq yang dikemas dalam buku yang berjudul *al Islam wa Ushul al-Hukm* menggemparkan Mesir dan dunia Islam. Buku tersebut mengejutkan raja Fuad (Penguasa Mesir) waktu itu, bahkan ia marah,

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.140.

karemna Ali Abdu ar-Raziq telah menghancurkan impian kekhalifahan, dan menggoyang kekuasaan raja.

Pada masa itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang despotic dan tiran. Tidak ada seorangpun yang sanggup menyuarakan kebenaran mengkritik raja Fuad. Namun Ali Abdu ar-Raziq seorang hakim yang masih muda berani melawan raja Fuad dengan jiwa yang semangat baru. Hingga sekarang, pemikiran Ali Abdu ar-Raziq tentang Khilafah dan negara Islam masih kontroversional, banyak yang mendukung pemikirannya, namun tidak sedikit pula yang menentangnya.⁴⁷

Pemikiran politik Ali Abdu al-Raziq tidak bias lepas dari situasi politik yang berlangsung pada hayatnya. pengaruh ini bias dilacak pada besarnya pengaruh pemikiran Abduh pada masa sekitar tahun 1900-an. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan dan semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan dimuka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat. Maka tidak heran jika dikalangan sementara sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah nasionalisme dan atau “sekularisme.” barangkali yang lebih kuat adalah makin menguatnya nasionalisme dan paham sekularisme yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam

⁴⁷Safan Kamil, *Kontroversi Khilafah Negara Islam*, (Jakarta; Erlangga), 2009. h.148

Mesir yang mengenyam pendidikan Barat. Pemikirannya bahkan telah melampaui dari gagasan-gagasan pemikiran Abduh.

C. Pemikiran Ali Abdul ar-Raziq tentang Agama dan Negara

Latar belakang pemikiran politik Ali Abdul ar-Raziq tidak bias lepas dari situasi politik yang berlangsung pada hayatnya. Pengaruh ini bias dilacak pada besarnya pengaruh pemikiran Abduh pada masa sekitar tahun 1900-an. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan dan semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan dimuka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam parta Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat. Maka tidak heran jika dikalangan sementara, sahabat, murid dan pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan kearah nasionalisme, dan atau “sekularisme”. Barangkali yang lebih kuat adalah menguatnya nasionalisme dan paham sekularisme yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam, Mesir yang mengenyam pendidikan Barat.⁴⁸

1. Hukum Mendirikan Khilafah

Bagi mereka mengangkat khalifah merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka orang Islam akan berdosa. Diantara mereka terjadi perselisihan pendapat mengenai apakah kewajiban itu berdasar pada *Syara'* atau akal kami tidak berkepentingan membahas hal tersebut tetapi mereka

⁴⁸ Akhmad Satori, *Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Ress, 2007), h. 148.

tidak berbeda mengenai bahwa dalam segala keadaan keberadaan Khalifah merupakan keharusan, Ibn Khaldun bahkan menganggap kewajiban tersebut disahkan oleh *Ijma'* (Konsensus). Ia berkata

“Sebagian kelompok menolak anggapan wajibnya membangun ke *Khalifa*-han baik secara akal maupun *Syara'*, diantara mereka adalah al-Asamm yang berasal dari kelompok Khawarij dan masih ada yang lain. Bagi mereka yang wajib dilakukan adalah melaksanakan hukum-hukum *Syara'*, sebab jika umat telah berkeadilan dan telah melaksanakan hukum Allah, keberadaan *imam* tidak lagi di butuhkan begitu juga menegakkannya, pendapat mereka ini kalah dengan *Ijma'*”⁴⁹

Dalil mereka tentang kewajiban mendirikan *Khilafah*.

Pertama. Ijma' sahabat dan Tabi'in “Sebab segera setelah mangatnya Rasul Saw, para sahabat membaiaat Abu Bakar r.a, menyerahkan urusan-urusan mereka kepadanya. Begitu juga pada periode-periode sesudahnya, masyarakat tidak pernah ditelantarkan dalam kekacauan tanpa *imam*.

Kedua; dengan mengangkat *imam* akan tampak syi'ar agama kepentingan rakyat, seperti *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang keduanya akan terlaksana. Apabila tidak ada seseorang yang bertindak melaksanakannya, unsur-unsur rakyat bakal kacau, bahkan yang terjadi *chaos*, kezaliman dimana-mana, anarkisme merajalela, tidak akan ada penyelesaian kemelut, padahal hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan sesuatu yang dapat menopang pelaksanaan *fardu* adalah juga *fardu*, dengan demikian

⁴⁹ Ali ABdul Mu'ti Muhammad, Pilsafat Politik Antara Barat dan Islam, (Bandung, Cv .Pustaka Setia. 2010), h. 85

mengangkat imam adalah *fardu*. Seperti halnya *anr* dan *nahi* yang tergantung kepada penegakan *imam*. Demikian pula *al-kulliyyat as-sitt* yang diperlukan untuk memelihara larangan dan *hudud* yang telah dijelaskan oleh *Syari'*. *Kulliyyat as-sitt* adalah memelihara agama jiwa, akal, dan keturunan, harta benda, dan kehormatan.⁵⁰

Dalam diskursus yang berkembang diantara para ulama yang berpandangan bahwa mendirikan *imamah* merupakan kewajiban, kami tidak melihat ada orang yang mencoba mengajukan dalil-dalil ke *fardu*-annya dengan ayat yang diambil dari Kitab Allah. Sungguh, kalau saja dalam *al-Kitab* ditemukan satu dalil saja tentunya para ulama tidak akan ragu untuk mengemukakannya. Atau andai dalam *al-Kitab al-Karim* didapati sesuatu yang serupa dalil atas wajibnya *imamah* tentu para pendukung *khilafah* akan menemukannya, karena banyak dari mereka yang berupaya mengambil yang mirip dalil sebagai dalil. Tetapi para penulis tidak sanggup menemukan *hujjah* dari *al-Kitab* untuk mendukung pandangan mereka. Akibatnya seperti yang kita lihat, mereka kadang berpaling pada *Ijma'* dan kadang menoleh pada standar-standar logika dan hokum-hukum akal.

Ada beberapa ayat Al-Quran yang harus kita pahami hakikat maknanya, agar kita tidak berandai-andai bahwa ia berkorelasi dengan persoalan *imamah*, seperti firman Allah “Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul serta Ulil Amri diantara kalian” (QS 4:6), juga kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka,

⁵⁰Ali AbdAr-Raziq, *Al-Islam Dasar-dasar Pemerintahan* (Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam), (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 18

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) (QS 4:58) dan seharusnya. Hanya saja kami tidak menemukan ada ulama yang mengklaim telah menemukan sesuatu pada ayat tersebut yang dapat dipakai sebagai dalil, juga orang yang berpegang teguh pada ayat tersebut. Agar tidak terjadi pemborosan kata dan tidak terjadi ‘perang tanpa musuh’ kami tidak ingin memperpanjang pembahasan tentang ayat tersebut.

Ketahuilah kata *Uli al-amr* pada ayat pertama oleh para ulama ditafsirkan sebagai para pembuka hukum muslimin pada masa Rasul dan masa sesudahnya termasuk para *khalifah*, *qadi* dan komandan pasukan termasuk dalam barisan mereka adalah ulama *Syara’*, atas dasar firman Allah: “Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan) mengetahui dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”

Sedangkan kata *uli al-amr* pada ayat kedua ditafsirkan sebagai “para pembesar sahabat yang memahami *sisik melik*, urusan mereka atau mereka yang menjadi amir-amir mereka”, apapun pengertiannya, kedua ayat tersebut tidak patut dijadikan dalil tentang *khilafah* seperti yang mereka katakana.

Penjelasan paling mungkin dari kedua ayat tersebut adalah bahwa kedua ayat tersebut menunjukkan adanya golongan dari kaum muslimin yang pada mereka semua urusan dikembalikan. Makna ini lebih umum dan luas ketimbang makna *khilafah* sebagai mana mereka sebutkan. Bahkan kedua makna itu saling berlawanan dan tidak mungkin mempertemukan.

Dalam hal ini ada pendapat yang mengecewakan yang dilontarkan oleh pengarang kitab, *al-Mawaqib* setelah ia menunjukkan dalil mengenai wajibnya menegakkan *imamah* dengan dasar *Ijma'* kaum muslimin. Ia berkata: “Jika dikatakan *Ijma'* haruslah memiliki sandaran, kalau berupa *naqal* hendaklah *naqal* yang *mutawatir*, say akan jawab bahwa *Ijma'* saja sudah cukup atau saya akan katakana sandarannya berupa persambungan aktivitas yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan penglihatan dan kesaksian mereka yang semasa dengan Nabi Saw.”⁵¹

Seperti terlihat dari pernyataan, bahwa *Ijma'* tersebut tidak memiliki sandaran. Pengarang Kitab *al-Mawaqif* tentu tidak akan melontarkan statmen tersebut andaikata ia menemukan sesuatu yang patut dijadikan sandaran dalam Kitab Allah. Sangat mengherankan anda meletakkan *al-Kitab al-Karim* ditangan mencermatinya berulang-ulang dari surat *al-fatihah* hingga *an-nas*, disana anda melihat penjelasannya tentang segala hal beserta perinciannya atas segala urusan agama, tidak kami alpakan sesuatupun dalam *al-Kitab* (al-an'am), tetapi disana anda tidak menemukan penyebutan tentang kepemimpinan umum ataupun *khilafah*.

Tidak hanya Al-Quran yang sengaja meng baikan persoalan *khilafah* ini tapi juga Sunnah. Bukti atas keadaan ini adalah ketidak mampuan para ulama menggali dalil dari hadis mengenai tema ini. Skalau saja mereka menemukan dalil dari hadis, tentu mereka akan mengajukan sebagai dalil dari pada

⁵¹*Ibid*, h. 18-20

Ijma'. Dan pengarang Kitab *al-Mawaqif* tidak akan berkata bahwa *Ijma'* tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat di-*naqal*-kan sandarannya.

Sayyid Muhammad Rasyid Rida bermaksud mencari dalil tentang wajibnya *khalifah* dalam sunah, ia kemudian menukil pendapat yang menunjukkan wajibnya *imamah* dari Sa'id ad-Din at-Taftazani dalam Kitab al-Maqasid. Namun karena diantara dalil-dalil tersebut ia tidak menemukan satu pun yang berasal dari Kitab Allah atau Sunnah Rasul, S Sayyid Rasyid lantas mengkritik Sa'id, bahwa ia dan rekan-rekannya lupa menggali dalil tentang penegakkan *imamah* dari hadis-hadis sahih yang mewajibkan mengikuti jama'ah kaum Muslimin dan imam-imam mereka. Diantara hadis tersebut secara *sarih* (Tegas) menjelaskan bahwa siapa yang mati dan tidak pernah ada baiat dilehernya maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Juga ada hadis Huzayfah yang *muttafaq alayh* (Disepakati ke sahihannya oleh Bukhari dan Muslim) yang berisi perkataan Nabi padanya, "Ptuhilah jamaah kaum Muslimin serta *imam-imam* mereka."⁵²

Melalu proyek ajaran reformasi pemikiran agamanya, ia menuntut pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah. Wilayah Islam hanyalah seputar agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya . abdu al- Raziq berkata "Islam tidak mengurus pemerintahan, atau negara atau kecenderungan-cendrungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tidak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi

⁵²*Ibid*, h. 20-21.

manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memandang tidak memberikan perhatian padanya. Demikian pula Rasul”⁵³

Atas dasar ini, Ali Abdu al-Raziq adalah orang yang pertamakali menyerukan pemisahan agama dari negara. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individual- spiritual dan tidak memberi perhatian terhadap keduniaan atau politik atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir begitu beliau wafat tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya, baik menyangkut risalah maupun klaim-klaimnya. Ali Abdu al-Raziq melihat Rasullullah dari dua sisi, pertama, ia adalah utusan yang diberi wahyu dan membawa risalah langit. Kedua, ia adalah seorang pemimpin politik untuk negara madinah, bahkan, ia adalah pemimpin politik pertama dalam Islam. Oleh karena itu, Abdu Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga Khilafah atau amanat besar.ia berkata “Sesungguhnya Khilafah sama sekali tidak memiliki landasan-landasan dari agama. Khilafah bahkan kebalikan agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsipnya”⁵⁴

Khalifah sama sekali bukanlah urusan agama, begitu juga pengadilan tugas-tugas pemerintahan lainnya dan pusat-pusat negara. Semua itu adalah urusan politik semata, agama tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Agama tidak mendefenisikannya dan juga tidak mengingkarinya. Agama tidak memerintahnya juga tidak melarangnya. Agama memasrahkan masalah

⁵³*Ibid*,h. 123

⁵⁴Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, (Bandaung: Cv. Pustaka Setia,2010),h. 443-444

itu kepada kita, supaya kita merujuk pada hukum logika, pengalaman umat manusia dan juga kaidah-kaidah politik.⁵⁵

Äli Abdur RÄziq juga menyandarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebelas ayat Al-Qur'an yang dikutip Raziq untuk mendukung pandangannya menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan politik. Firman-firman Allah tersebut saling menopang antara satu dengan yang lainnya dan menyatakan bahwa tugas risalah yang dibawa Nabi SAW tidak mencakup pendirian kekuasaan yang bersifat duniawi. Di antara ayat-ayat yang dikutipnya.⁵⁶

أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولُ يُطِيعُ مَنْ اللَّه ۖ حَفِظُوا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوْلىٰ وَمَنْ

Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".⁵⁷ (QS. An-Nisa, [4]:80).

مَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا أَهْتَدَىٰ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنَ الْحَقِّ جَاءَ كُمْ قَدْ أَلَّ النَّاسُ يَتَأْتِيهِمْ قُلُ
بِوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ أَنَا وَمَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَ

Artinya: Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan

⁵⁵Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah Negara dan Islam Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur raziq*, (Mesir: Erlangga, 2009), h. 50.

⁵⁶Muhammad Iqbal dan H.Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 116.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 91.

dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap dirimu".⁵⁸(QS. Yunus, [10]: 108)

الْبَلَّغُ إِلَّا الرَّسُولَ عَلَى مَا وَ اللَّهِ تَكْتُمُونَ وَمَا تُبْدُونَ مَا يَعْلَمُ

Artinya: “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan”.⁵⁹(QS. Al-Ma’idah, [5] : 99)

Dari sederetan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Ali Abdur Raziq menyatakan bahwa Al-Qur’an dengan menolak tugas Nabi SAW sebagai pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa dan pengatur karena tugas-tugas tersebut di atas adalah hak dan kekuasaan raja. Beliau tidak memiliki hak memaksa orang untuk beriman. Dengan demikian Nabi tidak mempunyai kedudukan menjadi penguasa (raja). Merakalah yang memiliki kekuasaan tidak untuk memaksa dan mengatur rakyatnya

Adalah suatu kenyataan sejarah, ketika Nabi berada di Madinah telah terbentuk suatu masyarakat islam. Orang-orang Arab yang sebelumnya bercerai-berai dan bermusuhan menjadi bersaudara dan bersatu dalam suatu kekuatan yang diikat oleh kesamaan keyakinan akidah dan agama. Mereka menjadi bangsa yang kuat dibawah satu pimpinan yaitu Nabi SAW sendiri. Sampai disini, logika Ali Abdur Raziq masih sejalan dengan pendapat umat Islam umu

mnya. Namun kemudian, ali menyatakan bahwa kepemimpinan Nabi terhadap bangsa Arab bukan dalam satu ikatan politik. Menurutny, Nabi

⁵⁸Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 221.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 124.

tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab. Nabi tidak pernah merombak sistem pemerintah, sistem administrasi, maupun sistem peradilan yang ada. Semua diserahkan Nabi pada masyarakat.⁶⁰

Pada dasarnya Ali Abdu al-Raziq lebih condong pada pihak yang tidak menyetujui diwajibkannya *khilafah*. Ini tercermin dalam pernyataan bahwa para ulama juga tidak sanggup mengeluarkan dalil yang diambil dari hadits.⁶¹

Secara prinsipil Ali Abdu ar-Raziq menjelaskan bahwa orang-orang Islam, jika digambarkan mereka adalah sekelompok masyarakat yang tidak bersatu, juga membutuhkan pemerintahan untuk menangani persoalan masyarakat.

Jika *imamah* dan *khalifah* yang dimaksudkan oleh para ulama sama dengan yang dikehendaki oleh para ahli politik sebagai pemerintahan, maka pendapat mereka adalah benar. Namun jika yang dimaksud adalah jenis pemerintahan tertentu seperti yang telah dijelaskan, maka argumentasi mereka tidak dapat diterima.

Inti dari pernyataan Ali Abdu ar-Raziq terkait dengan hukum mendirikan pemerintah adalah, masyarakat jelas membutuhkan kehadiran sebuah pemerintahan, namun hal itu tidak harus berbentuk *khilafah*. Ia bias berwujud apa saja tergantung kondisi masyarakatnya.⁶²

⁶⁰ Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein Nasution, *Op. Cit.* h. 117-118.

⁶¹ Akhmad Satori, *Sulaiman Kurdi, Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Ress, 2007), h. 150.

⁶² *Ibid*, h. 151.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama dan Negara

Pemikiran beliau yaitu *Sekuleris*, yakni paham yang menganggap bahwa negara dan agama tidak memiliki hubungan satu sama yang lain. Bahwa Islam adalah sebuah agama, bukan negara. Islam hanyalah seruan agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar agama dan Islam tidak mengurus pemerintahan, negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak.

Asumsi peneliti tentang agama dan negara yaitu (*Teokrasi*) saling keterikatan atau saling berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara.

Memang, istilah negara tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun sunnah tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya Al-qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosial politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk didalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman. Dalam Al-Qur'an juga biasa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara

langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian dan menghukum tindakan kriminal. Dalam al-qur'an siyasah al-syar'iyah penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekati manusia kepada Allah.

Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dengan menggunakan ar-Ra'yu, yakni pemikiran akal yang didasarkan atas kedua sumber utama. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam adalah kekal dan abadi. Ia sudah final dan tidak akan ada penambahan-penambahan baru, ia merupakan sumber baku bagi ajaran Islam bercorak universal dan berlakunya sepanjang masa. Namun Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab yang mengandung segala-galanya, dalam arti berisikan petunjuk kepada ummat manusia hingga menyentuh segala segi kehidupan sampai kepada sedetail-detailnya.

B. Pemikiran Ali Abdu al-Raziq Tentang Agama dan Negara Menurut Fiqh Siyasah

Realita negara kita yang sebagian besar penduduknya adalah muslim maka sangat dibutuhkan suatu sumber dalam membuat hukum yang bersendi Islam yang sumber tersebut tidak lain adalah Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, teks-teks Al-Quran tidak dapat dipahami secara eksklusif akan tetapi harus secara inklusif dan holistik. Dengan demikian posisi fiqh siyasah sangat besar dalam membuat suatu aturan agar peraturan tersebut dapat terealisasi baik dari segi Agama maupun dari segi sosial dalam hal ini bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan. kemaslahatan dari segi Agama maupun negara.

Fiqh siyasah dalam hal ini menyikapi konsep pemikiran Ali Abdu ar-Raziq tentang agama dan negara tidak sejalan dengan prinsip siyasah. Fiqh siyasah memberikan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai indikator untuk menjalankan roda pemerintahan dalam bernegara secara Islami yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Prinsip-prinsip secara implisit yang diperoleh dari fiqh siyasah secara keseluruhan tertuju pada suatu tujuan negara dan agama dalam lingkup masyarakat untuk merealisasikan tujuan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Peran Islam dan pemikir muslim yang ingin dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu member solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama yang beragam, sebuah Islam yang memberi keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang yang berdiam di nusantara ini.

Dilihat dari para pemikir muslim yang sejalan dengan konsep ajaran fiqh siyasah pemikiran Ali Abdu ar-Raziq tentang agama dan negara tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran fiqh siyasah, pemikiran beliau kontroversi yakni memisahkan antara urusan agama dan negara, sedangkan fiqh siyasah sendiri mengajarkan untuk tetap bersandar pada Al-Quran dan hadist.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Āli Abdu al-Rāziq mengatakan bahwa khilafah itu bukanlah system pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, persoalan agama dan dunia kita sama sekali tidak membutuhkan adanya khilāfah dalam arti fiqhse macam itu. Yang dimaksud adalah khilāfah sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah politik Islam. Āli Abdu al-Rāziq berpendapat bahwa dalam Islam model pemerintahan khilāfah tidak diperlukan. Kemudian ia mempertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan system khilafah merupakan kewajiban agama. Ia juga berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara, atau pemerintahan dengan gelar *khilāfah*, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taan sepenuhnya.

Dan menurut Āli Abdu al-Rāziq, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa adanya

kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan, keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri.

2. Negara yang ideal menurut Āli Abdu al-Rāziq adalah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya. Tentang demokrasi dan keadilan social, Āli Abdu al-Rāziq dalam pandangannya yang sekuler, tanpa segan dan dengan lantang, mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslim dan non muslim yang hidup dinegara itu. Negara yang berasakan humanism Universal dan system demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan social tanpa melibatkan agama.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang buku karya Āli Abdu al-Rāziq yaitu *Islam wa Ushūl al-Hukm*, ini masih perlu dikaji lagi demi untuk lebih mempertajam keakuratan buku, sehingga pendapat beliau yang tertuang dalam buku tersebut benar-benar dapat dipahami secara positif pada era politik zamans ekarang ini.
2. Adanya pemahaman terhadap masyarakat bahwa teori *Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan*, ini dapat dikaji lebih mendalam lagi. Namun teori ini tidak cocok bila diterapkan di negara yang berlandaskan Agama

terutama Islam yang masih memeluk teradisi, namun teori ini masih dapat di katakana relevan untuk diterapkan di negara Indonesia saat ini. Namun masyarakat juga harus lebih paham terhadap kondisi politik Indonesia saatini, karena sekalipun kita tidak menganut teori ini, namun kita dapat Berkembang serta maju, atas dasar kesatuan dan kesejahteraan.



DAFTAR PUSTAKA

- Satori, Akhmad. *Sulaiman kurdi Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Politeia Ress, 2007.
- Al-Raziq, Ali Abd. *Al-Islam Dasar Dasar Pemerintahan (Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam)*, Yogyakarta: Jendela, 2002
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* EdJakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Amiruddin, dan Arifin Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2006).
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Pramadina, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet IV, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet IV, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya, FajarMulya, 2009.
- Syamsuddin, Din. *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Logos : Jakarta, 2002.
- Al-Banna, Gamal. *Relasi Agama dan Negaracet.1*. Mata Air Publising: Jakarta, 2006
- Gibb H.A.R, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1996.
- Jamaluddin. *Berfikir Apa dan Bagaimana*. Surabaya Indah, 1989.
- Kautur, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Bandung: Truna Grafika, 2000.
- Khadir, Abdul, Muhamma. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: TP. Citra Aditya Bakti, 2004.

Woodward, Mark R. *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam*. Indonesia Terj. Chaniago, Mizan, Bandung 2004.

Umaidi, dan Marzuki Wahid. *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesi*, LKis, Yogyakarta, 2001

Mufti, Muhammad Ali ABdul, *Fisafat Politik Antara Barat dan Isla*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2010)

Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta Premada Media Group, 2010.

Albahy, Muhammad. *Islam dan Skularisme antara Cita dan Fakta*, Alih Bahasa: Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1998.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenada media Group, 2014

Ibnu, Mujar dan Khanamizda. *FIQH SIYASAH. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI, Press, Jakarta, 1993.

Republika. 25 Mei 1993.

Salim Peter, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Lentera Basritama, 1990.

Pulungan, Suyuti. *FIQH SIYASAH Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997

Thoimah, Shobir. *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut.

Uharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Ed Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.